



Anomali Transaksi Lebih Mudah Terdeteksi

Fitur e-Audit Katalog Versi 6 Persempit Potensi Tindak Korupsi

YOGYA. TRIBUN - Ruang gerak oknum pejabat atau penyedia barang dan jasa untuk memanipulasi anggaran negara terus dipersempit, melalui pengawasan ketat secara *real time*. Peringatan keras pun mencuat dari Graha Pandawa, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12), lewat peluncuran fitur e-Audit Katalog Versi 6.

Tiga lembaga raksasa pengawas negara; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terlibat langsung di dalamnya. Fitur yang digadang-gadang menjadi mata-mata digital pemburu anomali transaksi itu, sontak memperkuat pesan rangkalan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dipusatkan di Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK sekaligus Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Agus

Joko Pramono, menegaskan bahwa fitur ini bukan sekadar pelengkap sistem. Sebagai *early warning system* yang mampu mengendus ketidakwajaran sejak dini, sistem dirancang untuk memunculkan *red flag* atau bendera peringatan secara otomatis ketika pola transaksi mencurigakan terjadi.

"Fitur ini memberikan refleksi bahwa 'Oh, sudah terjadi tanda-tanda anomali'. Misalnya, ada barang yang tayang dulu di katalog, kemudian langsung dibeli. Itu sudah *red flag*," tandasnya.

Meski demikian, lembaga antirasuah mengakui, seaneh apapun sistem, terjadinya tindak pidana korupsi sangat bergantung kepada niat dan determinasi pelakunya. Namun, Joko menekankan, keberadaan e-Audit generasi terbaru ini membuat upaya untuk menyembunyikan jejak kejahatan akan menjadi hal yang mustahil.

"Kita harapkan orang akan berpikir tiga empat kali untuk berusaha *escape* dari tindak pidana korupsi. Karena, fitur ini membuat deteksi lebih mudah dan cepat diketahui," tandasnya.

Senada dengan KPK, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan, peluncuran ini sebagai sinyal bahaya bagi siapa saja yang ingin coba-coba melakukan *fraud*. Menurutnya, jejak digital dalam e-Katalog kini bisa dilacak hingga ke akar-akarnya, baik dari sisi penyedia (vendor) maupun pengguna anggaran di pemerintahan.

"Ini peringatan kepada orang-orang yang mau coba-coba lagi. Hati-hati. Kamu sekarang bisa dilacak semua kalau pakai e-Katalog. Lubang untuk korupsi sudah semakin kecil," terangnya.

Analisis

Sementara, Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, memberikan penjelasan teknis yang membuka mata mengenai cara kerja *tools* pengawasan yang ditempatkan pada ekosistem e-Katalog Versi 6 tersebut. Kecerdasan buatan dalam sistem ini mampu menganalisis kewajaran waktu transaksi, seperti terkait modus yang kerap luput dari pengawasan manual, yakni negosiasi kilat.

"Proses negosiasi yang biasanya memakan waktu dua hari karena alot, tapi lewat data e-Audit APiP bisa dilihat, *Lho kok ini satu menit selesai?*". Belum tentu salah memang, tapi ini adalah *early warning*

system," paparnya.

Data tersebut akan memicu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk masuk dan memeriksa lebih dalam, apakah benar terjadi negosiasi atau hanya formalitas belaka. Adapun fitur e-Audit Katalog Versi 6 memiliki keunggulan utama seperti *dashboard* terintegrasi langsung dengan akun INAPROC, audit berbasis bukti digital, hingga analisis menyeluruh.

"Syarat utamanya, e-Audit ini harus dipakai oleh teman-teman APIP secara reguler. Kalau mengindikasikan penyimpangan, tentu ada proses lebih lanjut," pungkas Sarah. (aka/ord)

BENDERA PERINGATAN

- KPK, BPKP, serta LKPP bersinergi mengembangkan fitur e-Audit Katalog Versi 6, dalam pengawasan real-time transaksi pengadaan barang dan jasa.
- Sebagai *early warning system*, sistem ini dirancang untuk memunculkan *red flag* atau bendera peringatan secara otomatis ketika pola transaksi mencurigakan terjadi.
- Fitur e-Audit Katalog Versi 6 diluncurkan di Graha Pandawa, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12).

TRIBUN JOGJA/AZKA
 RAMADHAN
TEROBOSAN
 - Peluncuran fitur e-Audit Katalog Versi 6 yang berlangsung di Graha Pandawa, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12).



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 13 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005